

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI KOTA BINJAI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI								6.074.416.437,00	5.270.666.037,00	5.219.434.357,00	-854.982.080,00						7.324.794.310,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.074.416.437,00	5.270.666.037,00	5.219.434.357,00	-854.982.080,00							7.324.794.310,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6.074.416.437,00	5.270.666.037,00	5.219.434.357,00	-854.982.080,00							7.324.794.310,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.371.167.239,00	4.779.452.537,00	4.708.266.857,00	626.267.071,00							5.997.434.310,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	- -	-		17.717.307,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			17.717.307,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.771.727.666,00	3.244.933.601,00	3.244.979.601,00	-526.748.065,00			-	- -	-		4.410.100.178,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	3.686.417.132,00	3.156.253.601,00	3.156.299.601,00	-530.117.531,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			4.316.258.590,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	85.310.534,00	88.680.000,00	88.680.000,00	3.369.466,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			93.841.588,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	552.939.573,00	330.352.852,00	271.214.172,00	-281.725.401,00			-	- -	-		654.616.825,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				125 Paket	125 Paket	10.000.000,00	4.731.300,00	4.731.300,00	-5.268.700,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.346.475,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	145.709.850,00	0,00	0,00	-145.709.850,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			341.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.339.840,00	128.160.792,00	118.850.112,00	-31.489.728,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			97.352.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.569.883,00	54.032.760,00	54.032.760,00	-21.537.123,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63.381.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	4.320.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-720.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.336.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			47.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	23 Laporan	155.000.000,00	139.828.000,00	90.000.000,00	-65.000.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.000.000,00	256.519.300,00	256.519.300,00	231.519.300,00			-	- -	-		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	30.015.000,00	30.015.000,00
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	226.504.300,00	226.504.300,00
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	788.000.000,00	752.276.784,00	752.276.784,00
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	317.820.000,00	317.820.000,00
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	432.000.000,00	431.456.784,00	431.456.784,00

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	50.000.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00	180.000.000,00							230.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				300 Paket	300 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	50.000.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00	-22.480.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00	-22.480.000,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	25.889.198,00	12.270.000,00	12.270.000,00	124.110.802,00							150.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	25.889.198,00	12.270.000,00	12.270.000,00	-13.619.198,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.889.198,00	12.270.000,00	12.270.000,00	-13.619.198,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Binjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
			J U M L A H						6.074.416.437,00	5.270.666.037,00	5.219.434.357,00	-854.982.080,00							7.324.794.310,00	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI

Drs. Wahyudi Hasibuan
NIP.197304041993031004

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
TAHUN 2025 - 2029**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kiranya kami dapat menyusun RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan (Tahun 2021– 2026). Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun periode 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Tahun 2021-2026 sebagai Dokumen perencanaan yang dapat memberikan arah dan pedoman bagi semua personil di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dalam melaksanakan tugas, kinerja dan diharapkan dapat memberikan daya guna dan hasil guna dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kami menyadari bahwa RENSTRA ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan dalam penyusunan RENSTRA tahun mendatang. Akhirnya kami berharap dengan adanya RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan dengan baik.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI



Drs. WAHYUDI HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19730404 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	33
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan	41
4.2 Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah	114
BAB V PENUTUP	151

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra adalah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen renstra memuat tentang visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indicator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi PD.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pelayanan administrasi kependudukan akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pelayanan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan kalsifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kota Binjai, dalam pelaksanaannya bersama masyarakat dan pemerintah dimana masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat dan

pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan. Salah satu kegiatan pemerintah adalah pemberian pelayanan pada masyarakat yang merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Mengingat ruang lingkup pelayanan umum sangat kompleks dan krusial maka senantiasa perlu dikaji dan dievaluasi secara proaktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Agar tercipta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang baik dan benar dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi;
9. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020- 2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai;
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- 2) Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Binjai.
- 3) Melakukan *Simplifikasi* atau penyederhanaan prosedur serta berkoordinasi dengan PD lingkup pemerintahan Kota Binjai yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.
- 4) Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pelayanan administrasi kependudukan guna menunjang capaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Renja Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja (LKJ) yang bersifat tahunan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Disdukcapil Kota Binjai merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Binjai khususnya dalam menjalankan agenda rencana pelayanan administrasi kependudukan yang telah tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Disdukcapil Kota Binjai akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Disdukcapil Kota Binjai.

1.4. Sistematika Penulisan

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

- Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
 - Sumber daya perangkat daerah
 - Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan
 - Kelompok sasaran layanan (misalnya Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kelompok sasaran layanannya adalah unit kerja).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
- Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaanpengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sehingga terjadi perubahan dari Tupoksi lama menjadi Tupoksi yang baru berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan Tugas Pembantuan.

1) Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
4. Pengelolaan urusan ASN;

5. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
8. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
9. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
10. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
11. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
12. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
13. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan fungsinya

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum dan progam serta keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. mengkoordinasikan dan menyusun program serta anggaran;
2. melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik negara;
4. Pengelolaan urusan ASN

3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi penyusunan program, anggaran dan pengelolaan keuangan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program, anggaran dan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- d. menyiapkan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undang;
- f. menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. menyiapkan bahan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan

4) Subbagian Umum dan Program

Subbagian Umum dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan persuratan;
- b. mengelola dokumentasi dan kearsipan;

- c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertibankantor;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
- e. melaksanakan urusan administrasi ASN.

5) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi:

- a. menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk

6) Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk lingkup identitas penduduk.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penertiban dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- d. melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata

penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

- e. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak.

7) Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi Pindah Datang Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk lingkup pindah datang penduduk.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
- c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- d. melakukan pelayanan pindah datang penduduk;
- e. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

8) Seksi Pendataan Penduduk

Seksi Pendataan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk lingkup pendataan penduduk.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pendataan Penduduk mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pendataan penduduk;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan penduduk;
- c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
- d. melaksanakan pendataan penduduk;
- e. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk.

9) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang pelayanan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. menyusun perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. merumuskan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;

10) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil lingkup Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- d. melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- e. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- f. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian.

11) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- a. menyusun perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

12) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data lingkup sistem informasi administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- c. menyiapkan dan melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;

- e. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

13) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data lingkup pengolahan dan penyajian data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

14) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data lingkup kerjasama dan inovasi pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sumber-sumber daya yang ada dapat disajikan pada tabel-tabel di bawah ini:

2.2.1.Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Tabel 2.1
Jumlah Pejabat dan Pelaksana

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pejabat Pratama	1
2	Pejabat Administrator	3
3	Pejabat Pengawas	1
4	Pejabat Fungsional	5
5	Ketua Tim Kerja	3
6	Pelaksana	19
7	Pegawai Pemerintah dengan PK	8
	Total Pegawai	40

Data per April 2025

Tabel 2.2
Jumlah Keseluruhan SDM

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	32
2	Pegawai Pemerintah dengan PK	8
3	Tenaga Kontrak	279
	Total Pegawai	319

Data per April 2025

Tabel 2.3
Jenjang Pendidikan SDM Perangkat Daerah

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3 (Doktoral)	0
2	Strata 2 (Magister)	1
3	Strata 1 (Sarjana)	16
4	Ahli Madya 3	2
5	SMA	18
6	SMP	1

7	SD	2
	Total	40

Tabel 2.4
Pegawai yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No.	Uraian Diklat	Jumlah
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	0
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	0
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	0
	Total	0

Tabel 2.5
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	1
4	JF Perencana	1
5	JF Analis Bencana	3
6	JF Analis Kebakaran	2
7	JF	
8	Pelaksana	20

2.2.2.Keadaan Sumber Daya Pendukung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Sebagai pendukung dalam kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6
Keadaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung

No.	Uraian	Jumlah
1	Luas Lahan Kantor	390 m2
2	Luas parkir kantor	323 m2
3	Jumlah Gedung atau Bangunan	3
4	Jumlah Ruang Kerja	7
5	Jumlah Ruang Rapat	1
6	Jumlah Aula	-
7	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	12
8	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	7
9	Jumlah toilet	6
10	Jumlah Genset	3

**2.2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Binjai**

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode Renstra sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dapat diketahui guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Target yang ditetapkan pada Rencana Strategis periode sebelumnya belum mengacu terhadap indikator kinerja daerah. Mendasarkan pada pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada kurun waktu tahun 2021-2026, diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target	Target	Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-	Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke-				
		NS	IK	2022			2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
		PK	K																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Indeks Kependudukan																				
2	Persentase penduduk ber-KTP elektronik/nasional					99.15	99.25	99.35	99.45	99.55	99										
3	Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK)					97.75	97.99	98.05	98.25	98.35	95.52										
4	Persentase kepemilikan akta kelahiran					43.55	45.75	47.85	49.95	51.15	44.56										

7	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)								-	-	-		-	-	-		
8	Pasangan berakta Perkawinan																
9	Kepemilikan Akta Perceraian																
10	Kepemilikan Akta Kematian																
11	Jumlah OPD yang Telah memanfaatkan data kependudukan			1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Data Agregat Kependudukan			2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
14	Aplikasi arsiparis digital			-	-	-	-	1 apl	-	-	-	-	1 apl	1 apl	1 apl	1 apl	1 apl

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

2.3.1. Permasalahan Pelayanan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan, monitoring dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peluang merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi suatu organisasi untuk memanfaatkannya. Peluang tersebut tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan anggaran, akan tetapi dapat juga berupa respon masyarakat dan isu-isu yang sedang berkembang.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tahun 2025-2029 disusun dengan sangat memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tahun 2025-2029 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan meliputi:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur proses pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Meningkatnya kebutuhan data kependudukan bagi instansi pelayanan publik lainnya;
- c. Terselenggaranya Bimbingan teknis bagi aparatur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. Meningkatnya ketetapan dan kemantapan antara Standar Pelayanan dengan petugas pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi kapasitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta inovasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
- f. Regulasi yang jelas dalam mengatur alur proses pelayanan bagi petugas dan pengguna layanan administrasi kependudukan;
- g. Pemberian dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- h. Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk digunakan kepada pelayanan publik;
- i. Semakin meningkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- j. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak akan lepas dari peningkatan Sumber Daya, sarana dan prasarana serta perencanaan-perencanaan yang baik dalam melayani masyarakat untuk pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- k. Terbatasnya kapasitas dan kinerja pelayanan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- l. Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. Kualitas dan ketersediaan data serta informasi kependudukan belum maksimal;

- n. Terbatasnya aplikasi pengelola arsip hasil layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

2.3.2.Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Tabel. 2.1. Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil daerah	Kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan			Penjaminan privasi data kependudukan yang marak disalahgunakan	Penjaminan privasi data kependudukan dengan antisipasi <i>backup</i> data kependudukan yang otentik	Penguatan pengadministrasian layanan kependudukan digital
	Kesadaran masyarakat terhadap akte perkawinan dan perceraian belum maksimal terlapor, perlu adanya sosialisasi dari tingkat kelurahan dan kecamatan memberdayakan dokumentasi kependudukan					

Pengembangan dan pemanfaatan data kependudukan daerah	Kurangnya pengimplementasian ICT (TI) yang mendukung <i>e-government</i> dan <i>e-governance</i> untuk mendukung pelayanan administratif dan pelayanan publik yang responsif		Keamanan siber dan privasi data, termasuk ancaman serangan ransomware dan kebocoran data.	Kolaborasi global dalam tata kelola data, yang dapat memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alat diplomasi digital.	Aplikasi yang sudah terbangun namun akses dalam pengelolaan selalu terkendala; Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap dokumentasi kependudukan	
	Fungsionalis pengelola data masih kurang; pemanfaatan digitalisasi kependudukan masih kurang kesadaran pada masyarakat					Peningkatan SDM kependudukan dan pencatatan sipil yang tangguh secara mentalitas

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 (RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029) secara substansi mengacu pada visi misi hasil proses politik terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai secara langsung pada pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Penetapan Visi dan Misi sebagai landasan untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang telah disesuaikan dengan prinsip perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (RPJPD Tahun 2025-2045)

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi Kota Binjai

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan

ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

MAJU mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.

SEJAHTERA mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.

BERKELANJUTAN mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025-2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan

membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, maka dirumuskan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

Misi 4 : Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government, sejalan dengan Asta Cita 1 dan 7 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 3 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 3, 4 dan 8 pada RPJPD Binjai.

Misi RPJMD Kota Binjai 2024-2029 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Binjai, yang bertujuan untuk

mencapai kesejahteraan dan kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Binjai. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai memiliki penekanan pada mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat, Akuntabel dan Inovatif.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah: **"TERWUJUDNYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN"**

Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas dokumentasi kependudukan masyarakat
- 2. Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil
- 3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kependudukan terpadu

Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.1. RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	97	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan kualitas dokumentasi kependudukan, layanan pencatatan sipil, dan ketersediaan data dan informasi kependudukan yang terpadu	Perekaman KTP elektronik (%)	100	100	100	100	100	100	100

			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,01	4,01	4,01	4,10	4,15	4,25	4,55
			Pemanfaatan data kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100	100

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang dimaksud meliputi:

- a. Menyelaraskan peraturan dan kebijakan yang mendukung peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dengan memanfaatkan komitmen pimpinan daerah untuk meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Memanfaatkan sarana prasarana secara optimal guna meningkatkan pelayanan publik administrasi kependudukan;
- c. Mewujudkan perencanaan kemampuan SDM pada pelayanan administrasi kependudukan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Memanfaatkan secara maksimal aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang mendukung kesadaran dan keinginan masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan;
- e. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada good governance secara akuntabel dan transparan.

Tabel 3.2. Tahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan efektifitas perekaman kependudukan dan pencatatan sipil	Pemanfaatan perekaman kependudukan dan pencatatan sipil	Pengembangan terpadu atas perekaman kependudukan dan pencatatan sipil	Pembenahan publikasi dan kajian atas perekaman kependudukan dan pencatatan sipil	Pengelolaan dan pemanfaatan data besar atas perekaman kependudukan dan pencatatan sipil
Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK serta pusat data daerah untuk mendukung sistem pemerintahan digital.	Mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform digital yang terpadu dan efisien.	Memperkuat keamanan data dan jaringan guna memastikan perlindungan informasi pemerintahan dan publik.	Peningkatan literasi digital di kalangan aparatur pemerintahan.	Mengoptimalkan teknologi cerdas dan Big Data untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai merupakan penjabaran rincian tentang Langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang telah ditetapkan. Program kerja strategi merupakan Langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Program strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul di waktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai sebagai berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME+ A4:019	INDIKAT OR OUTCOM E	BASEL INE 2024	20 25	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN DAN PENCATATA N SIPIL					5.720.523.6 12,00		6.006.549.7 92,00		6.306.877.2 81,00		6.622.221.1 44,00		6.953.332.2 00,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					4.658.004.2 62,00		4.890.904.4 75,00		5.135.449.6 99,00		5.392.222.1 84,00		5.661.833.2 93,00	
Meningkatny a Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	97	100	100	4.658.004.2 62,00	100	4.890.904.4 75,00	100	5.135.449.6 99,00	100	5.392.222.1 84,00	100	5.661.833.2 93,00	Dinas/Ba dan yang menanga ni Bidang Administ rasi Kependud ukan Dan Pencatata n Sipil

2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					700.119.350,00		735.125.317,00		771.881.582,00		810.475.661,00		850.999.444,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,34	5	5,5	700.119.350,00	6,2	735.125.317,00	6,8	771.881.582,00	7,5	810.475.661,00	8,15	850.999.444,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	58,75	69,25	75,20		80		85		85,5		90,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Rate Nett Recent Migrasi (Nilai)	0,94	0,95	0,96		0,97		0,98		0,99		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN					226.100.000,00		237.405.000,00		249.275.250,00		261.739.012,00		274.825.962,00	

N SIPIL														
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,87	99,88	99,89	226.100.000,00	99,90	237.405.000,00	99,91	249.275.250,00	99,92	261.739.012,00	99,93	274.825.962,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	48,25	70,15	75,25		75,35		75,45		75,65		76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	78	85,85	85,85		86		86,05		86,15		86,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang	78,21	78,23	78,25		78,27		78.3078		78,32		78,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang

	Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)													Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					103.500.000,00		108.675.000,00		114.108.750,00		119.814.187,00		125.804.896,00	
meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	103.500.000,00	100	108.675.000,00	100	114.108.750,00	100	119.814.187,00	100	125.804.896,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					32.800.000,00		34.440.000,00		36.162.000,00		37.970.100,00		39.868.605,00	
meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	1	1	1	32.800.000,00	1	34.440.000,00	1	36.162.000,00	1	37.970.100,00	1	39.868.605,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi

	e)													Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					572052361 2.00		600654979 2.00		630687728 1.00		662222114 4.00		695333220 0.00	

TABEL 4.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintahan	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	
		Meningkatkan kualitas dokumentasi			Perekaman KTP elektronik (%)	

		kependudukan, layanan pencatatan sipil, dan ketersediaan data dan informasi kependudukan yang terpadu				
					Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	
					Pemanfaatan data kependudukan (%)	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya Pengelolaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

				Meningkatnya Pengelolaan atas Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Meningkatnya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Meningkatnya Kelengkapan Pakaian Dinas dan Atribut ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Meningkatnya Pengelolaan atas Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Meningkatnya Pengelolaan atas Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Meningkatnya Pengelolaan atas Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Meningkatnya Pengelolaan atas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum

				Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disedikan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Meningkatnya Fasilitas atas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu

				Meningkatnya Pengelolaan atas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Meningkatnya Pengadaan Mabel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel

				Meningkatnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Pelaporan atas Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat

					Surat Menyurat (Laporan)	Menyurat
				Meningkatnya Pelaporan atas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Meningkatnya Pelaporan atas Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya Pemeliharaan atas Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

				Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Parizinannya		Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Meningkatnya Pemeliharaan atas Peralatan dan Meisn Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Pemeliharaan atas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Pemeliharaan atas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

			penduduk		Digital (IKD) (%)	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
					Rate Nett Recent Migrasi (Nilai)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				Meningkatnya perekaman penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk

					Kependudukan (Dokumen)	
					Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01 Pelayan Pendaftaran Penduduk -
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01 Pelayan Pendaftaran Penduduk -
					Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01 Pelayan Pendaftaran Penduduk -
					Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01 Pelayan Pendaftaran Penduduk -

					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan	2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan

					Pendaftaran Penduduk (Laporan)	Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
					Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
					Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
					Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	2.12.02.2.01.0008 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk

					(Dokumen)	
				Meningkatnya Pelayanan Pendaftar Penduduk	atas Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
				Meningkatnya perekaman penduduk ke seluruh aspek	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

					(Dokumen)	
					Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk -
					Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk -
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk -

					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-
					Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-
					Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran	2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data

					Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	2.12.02.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait	2.12.02.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

					Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	an Terkait Pendaftaran Penduduk
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap data perekaman kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
					Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
			Meningkatn ya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL

					(Persentase)	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Meningkatnya atas pelaksanaan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil

					Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	
					Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.01.0003 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan	2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan

					Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	Kebutuhan
				Meningkatnya pencatatan sipil di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil -
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil -

					Kabupaten/Kota (Laporan)	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil -
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil -

					Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor	2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian

					Kementerian yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas

					UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil

					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02.0005 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan	2.12.03.2.02.0009 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan

					Sipil (Dokumen)	Sipil
					Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	2.12.03.2.02.0010 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0011 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

					Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	2.12.03.2.03.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di	2.12.03.2.03.0003 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama

					Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)	Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
			meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

				Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
				Meningkatna Pengelolaan pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan	2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan

					Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

					Administrasi Kependudukan (Laporan)	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari	2.12.04.2.03.0002 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari

					Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi

					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
				Meningkatnya Fungsi Koordinasi atas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

					Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait

					Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.04.0002 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan

					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
			meningkatkan kualitas profil kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
				Meningkatnya penyajian data kependudukan melalui profil kependudukan yang terpadu dan terpublish	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan
					Jumlah Dokumen Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan

					(Dokumen)	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

Tabel 4.3 Rencana Pendanaan Program, Kegiatan, SubKegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.720.523.612,00		6.006.549.792,00		6.306.877.281,00		6.622.221.144,00		6.953.332.200,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.658.004.262,00		4.890.904.475,00		5.135.449.699,00		5.392.222.184,00		5.661.833.293,00	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	97	100	4.658.004.262,00	100	4.890.904.475,00	100	5.135.449.699,00	100	5.392.222.184,00	100	5.661.833.293,00	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.717.307,00		18.603.172,00		19.533.330,00		20.509.997,00		21.535.497,00	
Meningkatnya Pengelolaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	17.717.307,00	1	18.603.172,00	1	19.533.330,00	1	20.509.997,00		21.535.497,00	

2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.717.307, 00		18.603.172, 00		19.533.330, 00		20.509.997, 00		21.535.497, 00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	17.717.307, 00	1	18.603.172, 00	1	19.533.330, 00	1	20.509.997, 00		21.535.497, 00	
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.204.770.1 30,00		4.392.963.6 36,00		4.595.191.8 20,00		4.812.006.4 10,00		5.034.986.7 30,25	
Meningkatnya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	93.841.588, 00	12	98.533.667, 00	12	103.460.35 1,00	12	108.633.36 8,00	12	114.065.03 7,00	
2.12.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				93.841.588, 00		98.533.667, 00		103.460.35 1,00		108.633.36 8,00		114.065.03 7,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	93.841.588, 00	12	98.533.667, 00	12	103.460.35 1,00	12	108.633.36 8,00	12	114.065.03 7,00	
Meningkatnya Pengelolaan atas Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28	28	4.110.928.5 42,00	28	4.294.429.9 69,00	28	4.491.731.4 69,00	28	4.703.373.0 42,00	28	4.920.921.6 93,25	
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.110.928.5 42,00		4.294.429.9 69,00		4.491.731.4 69,00		4.703.373.0 42,00		4.920.921.6 93,25	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	28	28	4.110.928.5 42,00	28	4.294.429.9 69,00	28	4.491.731.4 69,00	28	4.703.373.0 42,00	28	4.920.921.6 93,25	

	Tunjangan ASN (Orang/bulan)												
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000, 00		36.750.000, 00		38.587.500, 00		40.516.875, 00		42.542.718, 75	
Meningkatnya Kelengkapan Pakaian Dinas dan Atribut ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	30	35.000.000, 00	30	36.750.000, 00	30	38.587.500, 00	30	40.516.875, 00	30	42.542.718, 75	
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				35.000.000, 00		36.750.000, 00		38.587.500, 00		40.516.875, 00		42.542.718, 75	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	30	35.000.000, 00	30	36.750.000, 00	30	38.587.500, 00	30	40.516.875, 00	30	42.542.718, 75	
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				193.516.82 5,00		203.087.66 7,00		213.137.04 9,00		223.688.90 2,00		234.768.34 7,00	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disedikan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	24	5.336.100,0 0	24	5.602.905,0 0	24	5.883.050,0 0	24	6.177.203,0 0	24	6.486.063,0 0	
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.336.100,0 0		5.602.905,0 0		5.883.050,0 0		6.177.203,0 0		6.486.063,0 0	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	24	24	5.336.100,0 0	24	5.602.905,0 0	24	5.883.050,0 0	24	6.177.203,0 0	24	6.486.063,0 0	

undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)												
Meningkatnya Fasilitasitas atas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitasitas Kunjungan Tamu				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Terlaksananya Fasilitasitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan atas Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	97.352.500,00	12	102.220.125,00	12	107.331.131,00	12	112.697.688,00	12	118.332.572,00	
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				97.352.500,00		102.220.125,00		107.331.131,00		112.697.688,00		118.332.572,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	97.352.500,00	12	102.220.125,00	12	107.331.131,00	12	112.697.688,00	12	118.332.572,00	
Meningkatnya Pengelolaan atas Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (Paket)	12	12	63.381.750,00	12	66.550.838,00	12	69.878.379,00	12	73.372.298,00	12	77.040.913,00	
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan				63.381.750,00		66.550.838,00		69.878.379,00		73.372.298,00		77.040.913,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (Paket)	12	12	63.381.750,00	12	66.550.838,00	12	69.878.379,00	12	73.372.298,00	12	77.040.913,00	

Meningkatnya Pengelolaan atas Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	125	125	25.346.475,00	125	26.613.799,00	125	27.944.489,00	125	29.341.713,00	125	30.808.799,00	
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.346.475,00		26.613.799,00		27.944.489,00		29.341.713,00		30.808.799,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	125	125	25.346.475,00	125	26.613.799,00	125	27.944.489,00	125	29.341.713,00	125	30.808.799,00	
Meningkatnya Pengelolaan atas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	23	23	1.000.000,00	23	1.000.000,00	23	1.000.000,00	23	1.000.000,00	23	1.000.000,00	
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	23	23	1.000.000,00	23	1.000.000,00	23	1.000.000,00	23	1.000.000,00	23	1.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan atas Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	10	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	

Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor yang Disediakan (Paket)												
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.000.000,00		37.000.000,00		43.000.000,00		47.000.000,00		52.000.000,00	
Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
Meningkatnya Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	14.000.000,00	2	16.000.000,00	2	18.000.000,00	
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		16.000.000,00		18.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	14.000.000,00	2	16.000.000,00	2	18.000.000,00	

	Disediakan (Unit)												
Meningkatnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	15.000.000,00	3	18.000.000,00	3	21.000.000,00	3	22.000.000,00	3	24.000.000,00	
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		18.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	15.000.000,00	3	18.000.000,00	3	21.000.000,00	3	22.000.000,00	3	24.000.000,00	
Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	5.000.000,00	5	6.000.000,00	5	7.000.000,00	5	8.000.000,00	5	9.000.000,00	
2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	5.000.000,00	5	6.000.000,00	5	7.000.000,00	5	8.000.000,00	5	9.000.000,00	
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				121.000.000,00		133.500.000,00		147.000.000,00		159.500.000,00		173.000.000,00	

Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Pelaporan atas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	25.000.000,00	12	27.000.000,00	12	29.000.000,00	
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		29.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	25.000.000,00	12	27.000.000,00	12	29.000.000,00	
Meningkatnya Pelaporan atas Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	12	140.000.000,00	
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	12	140.000.000,00	
Meningkatnya Pelaporan atas Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.000.000,00	12	1.500.000,00	12	2.000.000,00	12	2.500.000,00	12	4.000.000,00	
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa				1.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		4.000.000,00	

Surat Menyurat													
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.000.000,00	12	1.500.000,00	12	2.000.000,00	12	2.500.000,00	12	4.000.000,00	
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.000.000,00		69.000.000,00		79.000.000,00		89.000.000,00		103.000.000,00	
Meningkatnya Pemeliharaan atas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	10.000.000,00	15	12.000.000,00	15	15.000.000,00	15	18.000.000,00	15	20.000.000,00	
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	10.000.000,00	15	12.000.000,00	15	15.000.000,00	15	18.000.000,00	15	20.000.000,00	
Meningkatnya Pemeliharaan atas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	20.000.000,00	2	21.000.000,00	2	22.000.000,00	2	23.000.000,00	2	24.000.000,00	

Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Parizinannya													
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	20.000.000,00	2	21.000.000,00	2	22.000.000,00	2	23.000.000,00	2	24.000.000,00	
Meningkatnya Pemeliharaan atas Peralatan dan Meisn Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1	18.000.000,00	1	19.000.000,00	
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	15.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.000.000,00	1	18.000.000,00	1	19.000.000,00	
Meningkatnya Pemeliharaan atas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Knator atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	10.000.000,00	15	20.000.000,00	15	25.000.000,00	15	30.000.000,00	15	40.000.000,00	
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana				10.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00	

dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	15	10.000.000,00	15	20.000.000,00	15	25.000.000,00	15	30.000.000,00	15	40.000.000,00	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				700.119.350,00		735.125.317,00		771.881.582,00		810.475.661,00		850.999.444,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	58,75	75,20	700.119.350,00	80	735.125.317,00	85	771.881.582,00	85,5	810.475.661,00	90,5	850.999.444,00	2.12.0.00.0.00.1 3.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	4,34	5,5		6,2		6,8		7,5		8,15		
	Rate Nett Recent Migrasi (Nilai)	0,94	0,96		0,97		0,98		0,99		1		
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				120.700.000,00		126.770.000,00		133.140.000,00		139.825.000,00		146.840.750,00	
Meningkatnya perekaman penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)		1	120.700.000,00	1	126.770.000,00		133.140.000,00	1	139.825.000,00	1	146.840.750,00	
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas		1		1		1		1		1		

	Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)												
	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	25	25		25		25		25		25		
	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan		1		1		1		1		1		

	Administrasi Kependudukan (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)		1		1		1		1		1		
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	

	(Dokumen)												
2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)		1	100.000,00	1	110.000,00		120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				120.000.00 0,00		126.000.00 0,00		132.300.00 0,00		138.915.00 0,00		145.860.75 0,00	
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	25	25	120.000.00 0,00	25	126.000.00 0,00	25	132.300.00 0,00	25	138.915.00 0,00	25	145.860.75 0,00	
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	

Peristiwa Kependudukan	Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)												
2.12.02.2.01.0006 - Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	
2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	
2.12.02.2.01.0008 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	

Penduduk	Perkembangan Penduduk (Dokumen)												
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				367.919.350,00		375.705.317,00		379.941.582,00		378.700.661,00		376.058.694,00	
Meningkatnya Pelayanan atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	200	200	367.919.350,00	200	375.705.317,00	200	379.941.582,00	200	378.700.661,00	200	376.058.694,00	
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				367.919.350,00		375.705.317,00		379.941.582,00		378.700.661,00		376.058.694,00	
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	200	200	367.919.350,00	200	375.705.317,00	200	379.941.582,00	200	378.700.661,00	200	376.058.694,00	

2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				106.500.00 0,00		117.650.00 0,00		133.800.00 0,00		146.950.00 0,00		163.100.00 0,00	
Meningkatnya perekaman penduduk ke seluruh aspek	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0	2	106.500.00 0,00	2	117.650.00 0,00	2	133.800.00 0,00	2	146.950.00 0,00	2	163.100.00 0,00	
	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	100	100		100		100		100		100		
	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungja wabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	4	4		4		4		4		4		

	(Dokumen)												
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)		20		20		20		20		20		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	0	1		1		1		1		1		
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	4	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.000.000,00	4	13.000.000,00	4	14.000.000,00	
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				5.100.000,00		5.110.000,00		5.120.000,00		5.130.000,00		5.140.000,00	

Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)		20	5.100.000,00	20	5.110.000,00	20	5.120.000,00	20	5.130.000,00	20	5.140.000,00	
2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk				15.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	100	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				20.000.000,00		24.000.000,00		28.000.000,00		29.000.000,00		33.000.000,00	
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	28.000.000,00	1	29.000.000,00	1	33.000.000,00	
2.12.02.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk				3.100.000,00		3.110.000,00		3.120.000,00		3.130.000,00		3.140.000,00	
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan	0	2	3.100.000,00	2	3.110.000,00	2	3.120.000,00	2	3.130.000,00	2	3.140.000,00	

Penduduk	Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)												
2.12.02.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk				2.100.000,00		2.110.000,00		2.120.000,00		2.130.000,00		2.140.000,00	
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	0	1	2.100.000,00	1	2.110.000,00	1	2.120.000,00	1	2.130.000,00	1	2.140.000,00	
2.12.02.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk				1.200.000,00		2.320.000,00		3.440.000,00		4.560.000,00		5.680.000,00	
Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	0	10	1.200.000,00	10	2.320.000,00	10	3.440.000,00	10	4.560.000,00	10	5.680.000,00	

	(Dokumen)												
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				105.000.00 0,00		115.000.00 0,00		125.000.00 0,00		145.000.00 0,00		165.000.00 0,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan data terhadap data perekaman kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	15	15	105.000.00 0,00	15	115.000.00 0,00	15	125.000.00 0,00	15	145.000.00 0,00	15	165.000.00 0,00	
	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk (Laporan)	20	20		20		20		20		20		
2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan,				25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00	

Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	15	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	
2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00	
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	20	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00	20	40.000.000,00	20	50.000.000,00	
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	

2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				226.100.00 0,00		237.405.00 0,00		249.275.25 0,00		261.739.01 2,00		274.825.96 2,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,87	99,89	226.100.00 0,00	99,90	237.405.00 0,00	99,91	249.275.25 0,00	99,92	261.739.01 2,00	99,93	274.825.96 2,00	2.12.0.00.0.00.1 3.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	48,25	75,25		75,35		75,45		75,65		76		
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	78	85,85		86		86,05		86,15		86,20		
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	78,21	78,25		78,27		78.30. 78		78,32		78,33		
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				79.600.000, 00		90.865.000, 00		102.695.25 0,00		115.119.01 2,00		128.165.96 2,00	
Meningkatnya atas pelaksanaan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)		1	79.600.000, 00	1	90.865.000, 00	1	102.695.25 0,00	1	115.119.01 2,00	1	128.165.96 2,00	
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)		1		1		1		1		1		

	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	300	300		300		300		300		300		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)		1		1		1		1		1		
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	

Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)												
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	
2.12.03.2.01.0003 - Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	
2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	

Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)												
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				79.200.000,00		90.425.000,00		102.215.250,00		114.599.012,00		127.605.962,00	
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	300	300	79.200.000,00	300	90.425.000,00	300	102.215.250,00	300	114.599.012,00	300	127.605.962,00	
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				146.100.000,00		146.100.000,00		146.100.000,00		146.100.000,00		146.100.000,00	
Meningkatnya pencatatan sipil di daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	146.100.000,00	1	146.100.000,00	1	146.100.000,00	1	146.100.000,00	1	146.100.000,00	
	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi,	1	1		1		1		1		1		

	Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)												
	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan	2	2		2		2		2		2		

	Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)												
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	

Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam													
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.12.03.2.02.0005 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	1	20.000.000, 00	1	20.000.000, 00	1	20.000.000, 00	1	20.000.000, 00	1	20.000.000, 00	
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil				25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00	
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	
2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil				23.000.000, 00		23.000.000, 00		23.000.000, 00		23.000.000, 00		23.000.000, 00	
Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	2	2	23.000.000, 00	2	23.000.000, 00	2	23.000.000, 00	2	23.000.000, 00	2	23.000.000, 00	
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				1.000.000,0 0		1.000.000,0 0		1.000.000,0 0		1.000.000,0 0		1.000.000,0 0	
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2	2	1.000.000,0 0	2	1.000.000,0 0	2	1.000.000,0 0	2	1.000.000,0 0	2	1.000.000,0 0	
2.12.03.2.02.0009 - Kerja Sama dengan Organisasi				1.000.000,0 0		1.000.000,0 0		1.000.000,0 0		1.000.000,0 0		1.000.000,0 0	

Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil													
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
2.12.03.2.02.0010 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pencatatan Sipil (Orang)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
2.12.03.2.02.0011 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	

Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				400.000,00		440.000,00		480.000,00		520.000,00		560.000,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)		1	400.000,00	1	440.000,00	1	480.000,00	1	520.000,00	1	560.000,00	

	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)		1		1		1		1		1		
2.12.03.2.03.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan,		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	

Pelayanan Pencatatan Sipil	Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)												
2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	
2.12.03.2.03.0003 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	

Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)		1	100.000,00	1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI				103.500.000,00		108.675.000,00		114.108.750,00		119.814.187,00		125.804.896,00	

KEPENDUDUKAN													
meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Di Manfaatkan (Persentase)	100	100	103.500.000,00	100	108.675.000,00	100	114.108.750,00	100	119.814.187,00	100	125.804.896,00	2.12.0.00.0.00.13.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				30.000.000,00		33.000.000,00		24.120.000,00		39.000.000,00		42.000.000,00	
Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)		1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	24.120.000,00	1	39.000.000,00	1	42.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)		1		1		1		1		1		
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	

Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)		1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	
2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		120.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	
Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)		1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	120.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00	
2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				18.590.000,00		18.025.000,00		16.298.750,00		24.384.187,00		23.034.896,00	
Meningkatna Pengelolaan pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	0	1	18.590.000,00	1	18.025.000,00	1	16.298.750,00	1	24.384.187,00	1	23.034.896,00	

	Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)												
2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				18.590.000,00		18.025.000,00		16.298.750,00		24.384.187,00		23.034.896,00	
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	0	1	18.590.000,00	1	18.025.000,00	1	16.298.750,00	1	24.384.187,00	1	23.034.896,00	

2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				40.410.000, 00		44.450.000, 00		48.490.000, 00		52.530.000, 00		56.570.000, 00	
Meningkatnya Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		10	40.410.000, 00	10	44.450.000, 00	10	48.490.000, 00	10	52.530.000, 00	10	56.570.000, 00	
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)		10		10		10		10		10		
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungja wakan		2		2		2		2		2		

	(Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)		5		5		5		5		5		
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		2		2		2		2		2		
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	

Administrasi Kependudukan													
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		2	10.000.000,00	2	11.000.000,00	2	12.000.000,00	2	13.000.000,00	2	14.000.000,00	
2.12.04.2.03.0002 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	
Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)		5	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00	5	14.000.000,00	
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	
Terfasilitasinya Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas		10	10.000.000,00	10	11.000.000,00	10	12.000.000,00	10	13.000.000,00	10	14.000.000,00	

Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)												
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)		10	10.000.000,00	10	11.000.000,00	10	12.000.000,00	10	13.000.000,00	10	14.000.000,00	
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00		150.000,00	
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		1	110.000,00	1	120.000,00	1	130.000,00	1	140.000,00	1	150.000,00	
2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)		2	100.000,00	2	110.000,00	2	120.000,00	2	130.000,00	2	140.000,00	

2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)		2	100.000,00	2	110.000,00	2	120.000,00	2	130.000,00	2	140.000,00	
2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				100.000,00		110.000,00		120.000,00		130.000,00		140.000,00	
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)		2	100.000,00	2	110.000,00	2	120.000,00	2	130.000,00	2	140.000,00	
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				14.500.000,00		13.200.000,00		25.200.000,00		3.900.000,00		4.200.000,00	

Meningkatnya Fungsi Koordinasi atas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)		1	14.500.000,00	1	13.200.000,00	1	25.200.000,00	1	3.900.000,00	1	4.200.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan		1		1		1		1		1		

	Data Kependudukan (Laporan)												
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)		1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00	
2.12.04.2.04.0002 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan				3.500.000,00		1.100.000,00		12.000.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00	

Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)		1	3.500.000,00	1	1.100.000,00	1	12.000.000,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00	
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00		1.400.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi		1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00	1	1.400.000,00	

Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)												
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-			32.800.000,00		34.440.000,00		36.162.000,00		37.970.100,00		39.868.605,00	
meningkatkan kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	1	1	32.800.000,00	1	34.440.000,00	1	36.162.000,00	1	37.970.100,00	1	39.868.605,00	2.12.0.00.0.00.1 3.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	-			32.800.000,00		34.440.000,00		36.162.000,00		37.970.100,00		39.868.605,00	
Meningkatnya penyajian data kependudukan melalui profil kependudukan yang terpadu dan terpublish	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	1	32.800.000,00	1	34.440.000,00	1	36.162.000,00	1	37.970.100,00	1	39.868.605,00	
	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1				1		
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				19.800.000,00		21.440.000,00		23.162.000,00		24.970.100,00		26.868.605,00	
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	19.800.000,00	1	21.440.000,00	1	23.162.000,00		24.970.100,00	1	26.868.605,00	

2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				13.000.000, 00		13.000.000, 00		13.000.000, 00		13.000.000, 00		13.000.000, 00	
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	1	13.000.000, 00	1	13.000.000, 00	1	13.000.000, 00	1	13.000.000, 00	1	13.000.000, 00	

4.2. Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025- 2029.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09 M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah:

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA DAERAH

N O	INDIKATO R	SATUA N	BASEL INE 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				202 5	202 6	202 7	2028	202 9	203 0	
(0 1)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,01	4,01	4,01	4,10	4,15	4,25	4,55	
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,35	2,35	2,44	2,53	2,62	2,71	2,8	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	97	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,87	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93	
3	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	1	1	1	1	1	1	1	
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	48,25	70,15	75,25	75,35	75,45	75,65	76	
5	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	4,34	5	5,5	6,2	6,8	7,5	8,15	
6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	58,75	69,25	75,20	80	85	85,5	90,5	
7	Rate Nett Recent Migrasi	Nilai	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1	
8	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang	Persentase	78	85,85	85,85	86	86,05	86,15	86,20	

	Melaporka n									
9	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporka n	Persentase	78,21	78,23	78,25	78,27	78.30.78	78,32	78,33	

Tabel 4.5.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk
			2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
			2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
			2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
			2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
			2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

			2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
2.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil
			2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
			2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
			2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
			2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
			2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
			2.12.03.2.02.0005 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
			2.12.03.2.02.0006 -

			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
			2.12.03.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
3.	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
			2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
			2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
			2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
			2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			2.12.04.2.03.0002 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
			2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan

			Pemanfaatan Data Kependudukan
4.	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	meningkatnya kualitas profil kependudukan	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan
			2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
			2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

Tabel 4.6.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

N O	INDIKATOR	SATU AN	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	2.12.0.00.0.00.1 3.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai								
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	97	100	100	100	100	100	100
3.	Perekaman KTP elektronik	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,01	4,01	4,01	4,10	4,15	4,25	4,55

5.	Pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100
6.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,35	2,35	2,44	2,53	2,62	2,71	2,8

Tabel 4.7.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

NO	INDIKATOR	STATU S	SATUAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	positif	Indeks	97	100	100	100	100	100	100
3.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	positif	Persentas e	1	1	1	1	1	1	1
4.	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentas e	99,87	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93
5.	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	positif	%	4,34	5	5,5	6,2	6,8	7,5	8,15
6.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	positif	Persentas e	58,75	69,25	75,20	80	85	85,5	90,5
7.	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentas e	48,25	70,15	75,25	75,35	75,45	75,65	76
8.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentas e	78	85,85	85,85	86	86,05	86,15	86,20
9.	Rate Nett Recent Migrasi	positif	Nilai	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1
10.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	positif	Persentas e	78,21	78,23	78,25	78,27	78.30.78	78,32	78,33

BAB V

PENUTUP

Rancangan rencana strategis ini merupakan landasan awal bagi penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai Tahun 2025-2029 sesuai dengan kebijakan pembangunan jangka menengah pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan oleh Wali Kota terpilih.

Dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 2025-2029 disusun sesuai dengan mekanisme dan mempertimbangkan para pemangku kepentingan di Kota Binjai. Dokumen tersebut dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun dan/atau dalam kondisi lingkungan strategis tertentu. Kondisi strategis tertentu terkait dengan terjadinya bencana dalam skala yang cukup besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, ataupun perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029, terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Sebagai landasan awal penyusunan Rencana Strategis dokumen ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut, yang meliputi:

- Penyesuaian arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai terhadap arah kebijakan nasional bidang penanggulangan bencana termasuk penetapan kegiatan prioritas pada RPJMD 2025-2029;
- Penyusunan indikator kinerja utama, indikator kinerja outcome, indikator kinerja output;
- Penyusunan target lokasi dan sasaran kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang diturunkan kedalam target tahunan yang akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahunan BPBD dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Penjabaran rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke dalam rencana strategis Unit Kerja Eselon II, III dan rencana strategis Unit Kerja Ketua Tim Kerja; serta
- Penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

Diharapkan dengan penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai ini dapat memberikan gambaran tentang penyusunan rancangan strategis, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Binjai



Drs. WAHYUDI HASIBUAN

NIP. 19730404 199303 1 004